

**PENGARUH PENERAPAN PRINSIP GCG PADA PENYUSUNAN ANGGARAN DESA
SEKECAMATAN SUELA PERIODE 2023**

Eko Prihartono

Universitas Gunung Rinjani
Email: eprihartono8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi *accountability*, *transparency*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* terhadap penyusunan anggaran desa di Kecamatan Suwela tahun 2023. Menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sensus pada 72 responden, data dianalisis melalui regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya *transparency* yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan anggaran desa. Sementara itu, variabel *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan kelima variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Penyusunan Anggaran Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Good Corporate Governance (GCG) principles, including accountability, transparency, responsibility, independence, and fairness, on village budget preparation in Suwela District in 2023. Using quantitative methods with a census technique on 72 respondents, the data were analyzed through multiple linear regression. The results indicate that partially, only transparency has a positive and significant effect on village budget preparation. Meanwhile, the variables accountability, responsibility, independence, and fairness do not have a significant effect. However, all five variables simultaneously have a positive and significant effect. These findings emphasize the importance of transparency in village budget management to improve the effectiveness and accountability of village government.

Keywords: *Good Corporate Governance, Village Budget Preparation, Transparency, Accountability, Participation.*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik bukan hanya dituntut kepada pemerintah pusat,

provinsi maupun Kabupaten Kota yang ada di Indonesia. Pemerintah yang menjadi dasar kehidupan bernegara adalah Pemerintah Desa, dimana akan lebih dekat dengan seluruh warga masyarakat yang ada di masing-masing desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 2).

Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan pengelolaan ADD pada dasarnya adalah melaksanakan suatu rencana kegiatan yang telah diputuskan bersama melalui Musrenbangdes, sehingga perlu diberikan ruang bagi kepentingan dan inisiatif yang bersumber dari masyarakat. Karena itu, partisipasi pada tahap pelaksanaan pembangunan Desa, (Maskun 1994:44).

Dalam konteks Penyusunan Anggaran sektor publik, penerapan *Good Corporate Governance* merupakan suatu hal penting yang harus diterapkan, mengingat anggaran sektor publik merupakan hal substansial dalam terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *Good Corporate Governance* adalah Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa . Dalam hal ini pengertian *Good Corporate Governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga Pemerintah semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintahan maupun nonpemerintahan dengan istilah *Good Corporate* (Pramudya, 2015).

Penelitian yang dilakukan Pattiasina (2011) menguji pengaruh gaya kepemimpinan transformasional pada kinerja pelayanan dengan budaya kerja dan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi. Hasil pengujian ditemukan bahwa Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif pada kinerja pelayanan. Akan tetapi, budaya kerja sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja pelayanan. Sedangkan implementasi GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan yang artinya, implementasi GCG memperkuat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja pelayanan.

Penelitian Menurut Pratolo (2010) menganalisis peran GCG yang mana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip GCG yakni: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hubungan tidak langsung pada kepuasan masyarakat melalui kinerja pemerintah adalah prinsip-prinsip GCG, yakni variabel transparansi, pertanggungjawaban, dan keadilan.

Hasil penelitian Afif (2017) menyebutkan bahwa secara umum prinsip-prinsip GCG tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan anggaran di Desa se Kecamatan Aikmel, hanya satu prinsip yang mempunyai pengaruh signifikan yaitu prinsip *Responsibility*.

METODOLOGI PENELITIAN

Variabel penelitian menurut (Sugiyono, 2018: 57) merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi hal

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini telah diklasifikasikan menjadi dua Variabel yaitu Variabel independen (X) dan Variabel dependen (Y). Variabel dependen menurut (Sugiyono, 2018:58) merupakan Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya Variabel independen. Dalam Penelitian ini Variabel yang digunakan adalah Penyusunan Anggaran.

Variabel independen menurut (Sugiyono, 2018:58) merupakan Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya Variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 5 Variabel Independen adalah *Akuntability, Transparency, Indenpedency, Responsibility* dan *Fairness*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif yang memandang fenomena/gejala itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan yang bersifat Hubungan Kausalitas (sebab akibat) (Sugiyono, 2018: 15). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Akuntability, Transparency, Indenpedency, Responsibility* dan *Fairness* secara parsial terhadap penyusunan anggaran desa.

Populasi adalah wilayah atau tempat yang terdiri atas objek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:80).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2018:81). Teknik pemilihan dan penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Sampel Jenuh* (Sensus) merupakan teknik penentuan sampel, bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel . Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2014:85).

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien Determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2013: 97).

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen ini dilakukan untuk pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Adapun dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah "Skala Likert" untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan *skala likert* variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator vaiabel, kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2014: 92-93). Bentuk *skala likert* dengan lima angka penilaian, yaitu sebagai berikut :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Suwela merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur yang terletak di bagian utara Kabupaten Lombok Timur, dengan luas wilayah 115,01 Km². Luas ini merupakan 3,66% dari luas Kabupaten Lombok Timur yaitu seluas 1.605.55 Km². Ibukota Kecamatan Suwela berada di Desa Swela dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Sembalun, sebelah selatan berbatasan dengan Kec. Wanasaba, sebelah barat berbatasan dengan Kec. Pringgabaya, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kec. Pringgabaya. Secara demografis, Kecamatan Suwela berada pada ketinggian 394 Mdpl.

Kecamatan Swela terdiri dari 8 (Delapan) desa yaitu Desa Selaparang, Desa Ketangga, Desa Suntalangu, Desa Suwela, Desa Sapit, Desa Mekar Sari, dan Desa Puncak Jeringo.

Berdasarkan hasil uji t di atas menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dimana t tabel dicari pada tingkat signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dan $df_1 = \text{jumlah variabel independen}$ $df_2 = n - k - 1$ yaitu $72 - 5 - 1 = 66$ maka dapat diperoleh nilai t- tabel yaitu 1,996.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik variabel *Accountability* tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penyusunan Anggaran Desa yang mana nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu $1,164 < 1,997$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,249 > 0,05$, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini H_{a1} ditolak dan H_0 diterima. Tidak signifikannya hasil analisis pada variabel ini disebabkan karena adanya tumpang tindih pembagian tugas pada proses pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dan disebabkan juga Karen sering terjadi pergantian personal penanggung jawab keuangan sehingga menyebabkan ketidak konsistenan atau terjadi inkonsistensi sehingga mengakibatkan lemahnya implemementasi perinsip ini pada proses kegiatan di lapangan. Sehingga untuk mengfatasi ini sangat di butuhkan adanya ketetapan personil yang di tunjuk oleh pihak pimpinan dalam periode yang di tentukan.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik diketahui variabel *Transfarancy* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penyusunan Anggaran Desa yang terlihat bahwa t-hitung lebih besar dari t- tabel yaitu $2,338 > 1,996$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,02 > 0,05$ maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini H_{a2} diterima dan H_0 ditolak.

Berdasarkan perhitungan statistik dapat disimpulkan variabel *Independency* tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penyusunan Anggaran Desa yang dibuktikan dengan nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu $-1,083 < 1,996$, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini H_{a3} ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dapat disimpulkan variabel *Responsibility* tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penyusunan Anggaran Desa yang dibuktikan dari nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu $1,957 < 1,996$ dengan nilai signifikan $0,05 = 0,05$, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini H_{a4} ditolak dan H_0 diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dapat disimpulkan variabel *Fairness* tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penyusunan Anggaran Desa yang dibuktikan dari nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel yaitu $0,5988 < 1,996$ dengan angka signifikan $0,552$, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini H_{a5} ditolak dan H_0 diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :

1. Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa variabel *Accountability* tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyusunan anggaran desa.
2. Selanjutnya variabel *Transparency* hasil menunjukkan bahwa *Transparency* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyusunan anggaran desa.
3. Hasil penelitian variabel *Independency* menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyusunan anggaran desa.
4. Hasil analisis bahwa variabel *Responsibility* tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyusunan anggaran desa.
5. Hasil analisis Statistik bahwa variabel *Fairness* tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyusunan anggaran desa.
6. Hasil analisis statistik bahwa secara simultan Variabel *Accountability*, *Transparency*, *Responsibility*, *Independency*, *Fairness* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Penyusunan Anggaran Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiyana, Marita. 2008. Mekanisme Akuntabilitas LOD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Spirit Publik. Vol 4, No.2:169-184.
- Afifuddi. 2017. Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penyusunan Anggaran Desa di Desa Se Kecamatan Aikmel. Skripsi Universitas Gunung Rinjani.
- Aisyah, S., Karmizi., Savitri, E. 2014. Pengaruh Good Governance, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. JOM FEKOM Vol. 1 Universitas Riau. Pekanbaru.
- Amanda Sari, Yessi .2014.. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Informasi Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Pdam Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Pdam Tirta Dharma Kota Cirebon, Pdam Tirta Medal Kabupaten Sumedang, Dan Pdam Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan). Skripsi. Universitas Widyatama Bandung.
- Anthony, Robert dan Govindarajan, Vijay. 2005. Management Control System (Sistem Pengendalian Manajemen), Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta Rineka Cipta
- Ari Dwipayana. 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE (Institute for Research and Empowerment).
- Aviandri, Aldo.2015. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Sukoharjo Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri). Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, Jawa Timur.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta.

-
- Bulandari, Dan Damayanthi. 2014 Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Badung. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.3: 641-659, ISSN: 2302-8559.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X.